

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek :
Kata Kunci :

Tgl/Bln/Thn : 13/01/2009
Hari : Selasa
Halaman : 13

Penanganan Iklim Kajian Kerentanan Belum Disusun

Kajian kerentanan dampak perubahan iklim hingga kini belum dimiliki pemerintah. Namun, rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sudah ditetapkan sejak 2007.

Akibatnya, rencana aksi bersifat umum, tanpa menyebutkan lokasi atau bidang yang diprioritaskan. "Kajian kerentanan memang baru akan dibuat," kata Koordinator Indonesia Civil Society Forum for Climate Justice (CSF) Nur Hidayati pada pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Senin (12/1). CSF beranggotakan 28 organisasi nonpemerintah dan kelompok masyarakat di Indonesia.

Organisasi CSF menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Nur Hidayati mengatakan, penyusunan kajian kerentanan dampak perubahan iklim dilakukan dengan mengompilasi data penelitian atau menambahkan data-data lapangan dari CSF.

David Adrian dari Nastari yang mendampingi para petani di pantura Jawa menyebutkan, langkah adaptasi semestinya jelas dan terukur. Di bidang pertanian, misalnya, mengembangkan berbagai varietas padi sesuai kondisi iklim. Data di sembilan kecamatan di Kabupaten Karawang menunjukkan, petani masih kesulitan.

Banyak pekerjaan rumah

Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR), juga anggota pokja transfer teknologi DNPI, menyatakan, banyak pekerjaan rumah pemerintah terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. "Indonesia belum punya kajian kebutuhan teknologi," katanya.

Kajian kebutuhan teknologi dibutuhkan pemerintah untuk menentukan prioritas transfer teknologi. Tanpa data itu, Indonesia tidak akan mengetahui figur infrastruktur terkait teknologi, baik sektor industri, transportasi, pembangkit energi, dan lain-lain.

"Hasil kajian sementara, prioritas transfer teknologi bisa di bidang pembangkitan energi dan transportasi," ujarnya.

Analisis data terkini 23 model iklim global dari Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan, krisis pangan mengancam separuh populasi dunia pada 2100. Kita sekarang butuh varietas tinggi.

"Sejauh ini, Indonesia masih butuh konsistensi kebijakan. Di satu sisi mendukung langkah konservasi, tetapi di sisi lain mengeluarkan kebijakan yang justru mendorong konversi lahan," kata peneliti Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Georgio Budi Indarto.

Inkonsistensi pemerintah lainnya yaitu pembiayaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dana utang, hingga Rp 5,5 triliun. Padahal, komitmen awal bersama negara-negara berkembang lainnya, pembiayaan harus berupa hibah dari negara maju.

"Utang untuk adaptasi dan mitigasi hanya akan membuka krisis baru di masa depan," kata Fabby. Karena itu, hal tersebut harus serius dihindari. Sejauh ini, CSF menilai pemerintah belum memiliki fokus penanganan yang jelas dan terarah.